e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi Juli 2024

Pengaruh *Whistleblowing, Good Corporate Governance*, Dan Budaya Etis Organisasi, Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkereditan Desa, Di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

I Made Bramantara Oka Martedi[(1)]
Ni Komang Sumadi [(2)]
Kadek Dewi Padnyawati [(3)]
[(1)(2)(3)] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln Sanggalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: madebramantara@gmail.com

ABSTRACT

While whistleblowing refers to the act of exposing or outing a fraud, strong corporate governance refers to the management of a business that is responsible, open, and honest. Fraud is defined as a purposeful conduct carried out for individual or group gain that has caused harm to third parties or government organizations. This study's goal was to ascertain how whistleblowing, good corporate governance, and organizational ethical culture impact fraud. The fraud triangle theory was used in this investigation. The population of this study consists of 28 LPDs from the Banjarangkan District in the Klungkung Regency. The sampling method used is non-probability sampling with a saturated sample size of 116 respondents. SEM-PLS is the analysis method used in this investigation. According to the study's findings, fraud is positively impacted by whistleblowing, positively impacted by excellent corporate governance, and negatively impacted by ethical culture.

Keywords*: Whistleblowing, GCG, Organizational Ethical Culture*

PENDAHULUAN

Guna membantu Desa Pakraman menjalankan tugas kultralnya, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sebuah lembaga keuangan masyarakat. LPD ialah lembaga finansial yang menjadi bagian dari desa pakraman. Manajemen sumber daya finansial yang dimiliki desa pakraman yakni berupa simpan pinjam dengan maksud guna membiayai kehidupan anggota masyarakat baik secara individu maupun kolektif dalam rangka pembinaan kegiatan sosial budaya dan keagamaan. Komponen kelembagaan Desa Pakraman yaitu LPD mengelola potensi keuangan Desa Pakraman dengan menjalankan peran keuangan Desa Pakraman. LPD pada dasarnya dijadikan tempat penghimpunan dana, pemberi kredit, serta sebagai sumber pembiayaan aktivitas pembangunan bagi masyarakat desa pakraman (Melinda dan Ayu, 2021).

Kecurangan di Bali banyak terjadi di level paling bawah, khususnya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Saat ini ada 1.433 LPD, akan tetapi tidak semuanya berkembang. Di Bali, 158 (11,03%) LPD yang operasinya dinyatakan non aktif, yang menyebabkan

kebangkrutan. Meskipun tidak ada LPD yang dinyatakan pailit di Kota Denpasar, Tabanan memiliki tingkat kebangkrutan terbesar (*balitribune.co.id*).

Dari banyaknya kasus penyelewengan LPD, yang sangat menyita perhatian publik khususnya masyatakat Klungkung adalah kasus dugaan Korupsi LPD Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan kabupaten Klungkung. Shirley Manutede selaku kajari mengklaim, pihaknya sudah mengungkap kasus dugaan korupsi di LPD Bakas. Selain menghasilkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak konsisten, pengurus LPD juga tidak mematuhi SOP dalam menyalurkan kredit atau menerima simpanan. Sehingga, tidak mengelola dana LPD sesuai dengan konsep kehati-hatian. Bahkan tanpa jaminan, beberapa pinjaman tersedia, diluar maupun di dalam Desa Bakas. Dalam pemberian kredit di luar Desa Bakas, tidak ada koordinasi antar Desa, dan kegiatan administrasi tidak selesai sebagaimana biasa. Adanya tuntutan sementara bahwa LPD Bakas telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 4.242.903.424. Hal ini sesuai hasil *cross check* langsung pada konsumen yang bersangkutan dengan memanfaatkan data terkini nasabah di LPD Bakas yang sudah terkonfirmasi .*(TribuneBali.Com* https://bali.tribunnews.com/tag/lpd-bakas *)*

Studi Arfah (2011) mengklaim, sebuah institusi harus secara konsisten menerapkan teknik manajemen yang tepat yang diterapkan secara merata ke semua kelompok karena tingginya intensitas kecurangan yang terjadi disana. Sahari dan Kuniawan (2007) menyatakan bahwa pengelolaan GCG siap dalam mengurangi potensi adanya kecurangan. *good corporate governance* berfungsi sebagai standar guna menjalankan bisnis dengan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Dengan berfokus pada keterbukaan, non-diskriminasi, tanggung jawab yang jelas, dan kontrol masyarakat, gagasan dasar *GCG* dapat menghentikan adanya kecurangan ini saat dipraktikkan (Karyono, 2013).

Kebiasaan yang dibuat pada suatu organisasi sebagai pedoman melakukan aktivitas baik yang diperuntukan bagi karyawan mapunun orang lain disebut budaya organisasi. Ekayanti (2017) mengklaim, semakin efektif pengendalian internal dikarenakan penerapan budaya organisasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Budaya etis organisasi berdampak pada sikap, perbuatan, dan perilaku karyawannya. Perilaku etis dan tidak bermoral seseorang dipengaruhi oleh budaya organisasi. Orang yang bekerja untuk perusahaan dengan budaya negatif lebih cenderung terlibat dalam kecurangan. Budaya organisasi yang positif akan mempengaruhi seperti apa setiap karyawan berperilaku. Studi (Adinda, 2015). Penulis mengadopsi istilah tersebut sesuai fenomena yang telah disebutkan pada latar belakang diatas, **"Pengaruh *Whistleblowing, Good Corporate Governance*, Dan Budaya Etis Organisasi,**

Terhadap Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkereditan Desa, Di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung."

KAJIAN PUSTAKA

Teori Fraud Triangle+

Fraud Triangle Theory mengklaim bahwa ada tiga alasan utama mengapa kecurangan bisa terjadi. Ungkapan "*Fraud Triangle Theory*" dimanfaatkan guna mencirikan ketiga elemen ini. Sesuai gagasan ini, peluang (*opportunity)*, tekanan (*pressure)*, serta rasionalisasi (*rationalization)* ialah tiga unsur penyebab kecurangan. *The Fraud Triangle Theory* diterapkan pada studi ini sebab menjelaskan pentingnya mengurangi potensi kecurangan suatu instansi, yang dapat dikurangi dengan berani melaporkan kecurangan (*whistleblowing)*. Dengan berfokus pada keterbukaan, non-diskriminasi, tanggung jawab yang jelas, dan kontrol masyarakat, prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* bisa menghentikan terjadinya penyelewengan ini saat dipraktikkan. Selain itu, salah satu cirinya ialah dengan budaya organisasi yang kuat akan berkembang perilaku organisasi yang positif, seperti *sense of identity* (bangga menjadi bagian dari agensi) dan *sense of belonging (*rasa memiliki akan instansi).

***Fraud* (Kecurangan)**

Perilaku yang disengaja yang memengaruhi laporan keuangan serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun pihak lain disebut kecurangan. Demikian digambarkan sebagai suatu bentuk kejahatan melawan hukum dengan sengaja untuk mendapatkan sesuatu melalui penyelewengan, yang di klaim BPK RI (2007). *The Fraud Triangle Theory* memberikan penjelasan tentang kecurangan. Tekanan, peluang/kesempatan, serta rasionalisasi inilah yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Peluang ialah salah satu dari tiga faktor yang paling mungkin dikurangi dengan pengendalian internal yang efektif.

Whistleblowing

Teori *whistleblowing* menurut *Wikipedia* (2017), *Whistleblower*, juga dikenal sebagai pengadu/pelapor, ialah frasa yang dipakai guna menggambarkan seseorang maupun pihak yang merupakan pegawai, mantan pegawai, pekerja, atau anggota perusahaan maupun instansi dan yang memberi tahu pihak berwenang yang sesuai atas tindakan yang mereka yakini telah melanggar aturan *(Wikipedia 2021*). *Whistleblowing*, di sisi lain, didefinisikan oleh Miceli & Near (1985: 4) sebagai pengungkapan perilaku ilegal, tidak bermoral, atau kriminal kepada orang atau organisasi yang dapat mengakibatkan tindakan perbaikan oleh anggota organisasi,

apakah mereka masih aktif baik pegawai maupun mantan pegawai. Kecurangan merupakan perbuatan negatif yang disengaja maupun serta merugikan banyak orang.

Good Corporate Governance

Prokomsetda.bulelengkab mengklaim, teori *good corporate governance* menyerukan manajemen pembangunan yang efektif dan akuntabel yang berpegang pada prinsip demokrasi dan pasar yang berfungsi, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik di tingkat politik maupun administrasi, penegakan anggaran disiplin, dan mengembangkan lingkungan hukum dan politik yang memfasilitasi perluasan kegiatan bisnis. Mardiasmo (2009) mengklaim, praktik-praktik yang diterapkan suatu negara dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonominya dengan fokus pada pengembangan masyarakat merupakan *good governance*.

Budaya Etis Organisasi

Sesuai sejumlah definisi, budaya etis organisasi ialah pemahaman bersama yang membantu organisasi berkembang menjadi suatu sistem dan sumber makna bagi para anggotanya. Budaya komunitas dan budaya organisasi saling terkait erat satu sama lain (Sagiv & Schwartz, 2007). Nilai-nilai pribadi berkembang di awal masa kehidupan, seperti keyakinan bersama, dan diatur dalam hierarki dengan karakteristik yang dapat dijelaskan, terukur, dan dampak perilaku yang dapat diamati *(Douglas et al., 2001).*

Hipotesis Penelitian

H1: *Whistleblowing* berdampak negatif pada kecurangan *(Fraud*)

H2: *Good Corporate Governance* berdampak negatif pada kecurangan *(Fraud*)

H3: Budaya Etis Organisasi berdampak negatif pada kecurangan *(Fraud*)

METODE PENELITIAN

Proses penghimpunan serta analisis data dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang akan menjadi topik kajian dikenal dengan desain studi. *Whistleblowing* merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi *fraud*. Perusahaan/agensi yang mengikuti pendekatan ini bisa meminimalisir peluang bagi seseorang dalam melakukan kecurangan. Faktor kedua yaitu *Good Corporate Governance* ini merupakan tindakan yang dapat di lakukan perusahaan dengan memperuat aturan yang dapat meminimilisir terjadinya tindakan *Fraud* pada perusahaan. Budaya etis organisasi ialah faktor yang ketiga. Hal itu ialah kebiasaan yang di buat pada suatu instansi sebagai pedoman melakukan aktivitas baik yang diperuntukan bagi karyawan. Di gambar 3.1 tersaji desain studi:

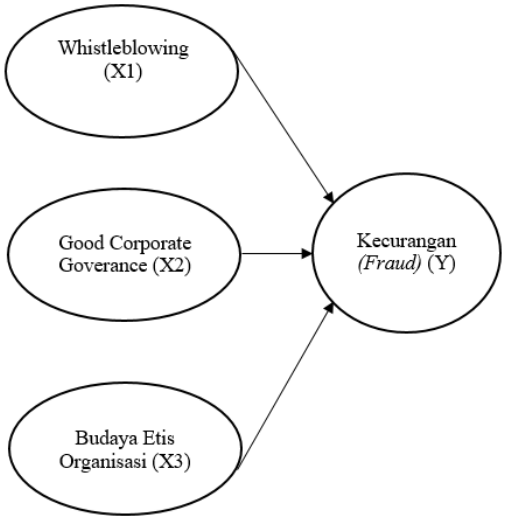

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Studi ini memuat populasi yang terdiri dari semua pegawai LPD yang ada di Kecamatan Banjarangkan Klungkung sebanyak 116 orang yang terdiri dari 30 LPD. Dari jumah 30 populasi LPD, terdapat 2 LPD yang tutup operaional karena krena kesulitan mendapat nasabah imbas dari pandemi. Populasi ini di pilih dengan tujuan menguji seluruh objek penelitian yang ada di jadikan acuan pengumpilan data. (LPLPD Kabupaten Klungkung : 2023). Pada kajian ini, *non-probability sampling* dengan pendekatan sampling jenuh diterapkan guna memperoleh data. Dimana Sampling jenuh ialah metode untuk menghitung ukuran sampel ketika seluruh populasi dimanfaatkan sebagai sampel. Dengan kata lain, sampling jenuh dapat dibandingkan dengan sensus yang memanfaatkan sampel yang diambil dari seluruh populasi. Sugiyono (2018 : 85). Alasan di pilihnya sampel jenuh sebab total populasi yang minim seta agar data yang di dapat lebih akurat. Sampel studi ini yakni 116 pegawai yang terdapat dari 28 LPD Se-Kecamatan Banjarangkan.(LPLPD Kabupaten Klungkung : 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Responden Penelitian

Selama tiga bulan, studi ini dilaksanakan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Angket dijadikan sebagai studi pendahuluan dan kuesioner studi dalam kajian ini, dengan total 116 personel LPD sebagai responden. Pada studi ini, tingkat respon pada kuesioner ialah 100% sehingga memungkinkan untuk diproses secara mendalam.

Uji Statistik Deskriptif dan Karakteristik Responden

Pada studi ini, statistik deskriptif menawarkan penilaian pada setiap variabel dan indikatornya. Sesuai temuan analisis deskriptif, dengan skor rata – rata indikatornya 3,6684, indikator *Whistleblowing* dinilai tinggi, dengan skor rata – rata indikatornya 3,8933, indikator *Good Corporate Governance* dinilai tinggi, indikator budaya etis organisasi dinilai tinggi dengan skor rata – rata indikatornya 3,9109 dan skor rata – rata indikator 3,9444 pada kecurangan *(fraud)* dinilai tinggi.

Evaluasi *Measurement Model* (Merancang *Outer Model*)

Validitas Konvergen

Tabel 4.1 Nilai *Outer Loaading*

Variabel	Indikator	Nilai Korelasi
Whistleblowing	WB.13	0,795
	WB.14	0,876
	WB.15	0,851
Good Corporate Governance	GCG.1	0,937
	GCG.2	0,965
	GCG.3	0,889
	GCG.4	0,886
Budaya Etis Organisasi	BEO.2	0,941
	BEO.3	0,933
	BEO.4	0,906
	BEO.5	0,854
	BEO.6	0,929
	BEO.7	0,940
	BEO.8	0,915
	BEO.9	0,897
Kecurangan *(Fraud)*	F.1	0,933
	F.2	0,938
	F.3	0,938
	F.4	0,951
	F.9	0,891

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil *outer loading*, awalnya ditemukan sejumlah indikator yang bernilai <0.60 yaitu WB.1 sampai dengan WB.12 dari variabel *whistleblowing*, indikator GCG.5 sampai dengan GCG.8 dari variabel *good corporate governance*, indikator BEO.1 dari variabel budaya etis organisasi dan indikator F.5 sampai dengan F.8 dari indikator kecurangan *(fraud)* sehingga harus di keluarkan dari model. Berikut hasil *outer loading test* setelah indikator tersebut di

keluarkan, berdasarkan tabel 1 menunjukan nilai *outer loading* seluruh indikator di atas 0,60 artinya valid sesuai kriteria *convregen validity*.

Validitas Diskriminan *(Diskriminant Validity)*

Tabel 4. 1 Tes Discriminant Validity

Variabel	AVE	√AVE	WB	GCG	BEO
WB	0,708	0,841			
GCG	0,846	0,920	0,814		
BEO	0,837	0,915	0,143	-0,065	
F	0,866	0,931	0,764	0,885	-0,053

Sumber : data diolah (2023)

Sesuai tabel 4.2 menunjukan nilai AVE seluruh konstruk >0,50 dan nilai akar AVE masing – masing konstruk berkisar 0,841 sampai dengan 0,931 > nilai korelasi yang besarya -0,053 sampai dengan 0,885 artinya valid sesuai kriteria *discriminante validity*.

Uji Releabilitas

Tabel 4. 2 Tes *Composite Releability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	***Cronbach's Alpha***	***Composite Releability***
WB	0,798	0,879
GCG	0,939	0,956
BEO	0,979	0,976
F	0,961	0,970

Sumber : data diolah (2023)

Sesuai tabel 4.3, setiap konstruk mempunyai nilai *Cronbach's alpha* >0,60 yang berarti memenuhi kriteria reliabilitas sesuai syarat reliabilitas komposit.

Evaluasi Model Struktural *(Structural model / Inner Model)*

Tabel 4. 3 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui *R-Square*

	R-Square	R-Square Adjusted
Kecurangan *(Fraud)*	0,789	0,784

Sumber: data diolah (2023)

Sesuai tabel 4.4 menunjukan bahwan nilai *R-square adjusted* 1variabel kecurangan *(fraud)* yakni 0,784 sesuai syarat Chin (Ghozali 2021) model penelitian ini dikategorikan pada kriteria model kuat. Yang artinya variasi *whistleblowing, good corporate governance* dan budaya etis organisasi sebesar (78,4%) terhadap kecurangan *(fraud)*.

Evaluasi Model Struktural Melalui F-*Square*

Tabel 4. 4 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui *F-Square*

Variabel	Kecurangan *(Fraud)*
Good Corporate Governance	0,852

Sumber: data diolah (2023)

Sesuai tabel 4.5 menunjukan terdapat 1 indikator yang berdampak kuat yaitu indikator *good corporate governance* dengan nilai 0,852 terhadap variabel kecurangan *(fraud)*..

***Path Analyisis* dan Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis di lakukan dengan melihat signifikansi yang terdapat pada koefisian jalur. Skor koefisien ditunjukkan oleh nilai t-statistik pada alpha 5% wajib >1,64% guna menguji hipotesis satu sisi dan 1,96 guna menguji hipotesis dua sisi, klaim (Hair et al., 2014).

Tabel 4. 5 Path Analyisis dan Pengujian Statistik

Variabel	Original Sampel (O)	T *Statistic* (|O/STDEV|)	P Value	Penjelasan
WB->F	0,142	2,031	0,021	Signifikan
GCG->F	0,768	10,550	0,000	Signifikan
BEO->F	-0,023	0,008	0,002	Signifikan

Sumber: data diolah (2023)

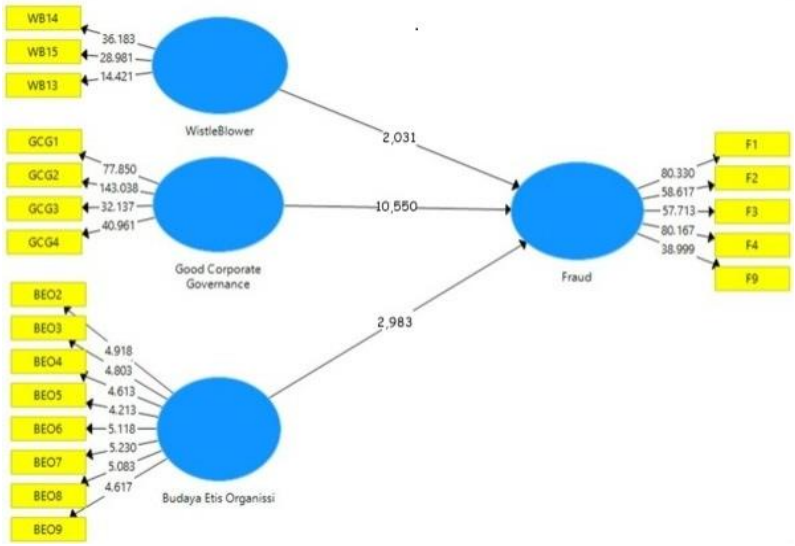

Gambar 4. 1 Bootstraping

Tabel 4.6 menunjukan:

1. Nilai t-hitung 2,031>t-tabel 1,64 menunjukkan bahwa *whistleblowing* berdampak positif 0,142 pada *fraud* dan korelasi ini signifikan pada taraf 5%.
2. Dengan nilai t-hitung 10,550 >t-tabel 1,64 maka *good corporate governance* berdampak positif 0,768 pada *fraud*, dan korelasi ini signifikan pada taraf 5%.
3. Dengan nilai t-hitung 2,983 >t-tabel 1,64, maknanya budaya etika organisasi berdampak negatif -0,023 pada *fraud*, dan korelasi ini signifikan pada taraf 5%.

Pembahasan

Dampak *Whistleblowing* Pada Kecurangan *(Fraud)*

Hipotesis pertama dalam studi ini ditolak (H1 ditolak) sesuai hasil tes hipotesis *whistleblowing* pada *fraud*, yang menunjukkan bahwa *whistleblowing* berdampak positif dan signifikan pada *fraud* LPD di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung . Hal tersebut memberikan dampak yang positif pada pentingnya *whistleblowing* pada *fraud*, maka sebab itu meskipun sistem *whistleblowing* LPD di Kabupaten Banjarangkan lebih baik dari rata-rata, namun *fraud* belum dapat direduksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada elemen lain di luar model studi ini yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal tersebut menandakan masih lemahnya *whistleblowing system* yang dimiliki oleh LPD, artinya setiap adanya pengaduan akan terjadinya suatu tindak kecurangan oleh para *whistleblower* tidaklah mendapat respon yang baik atau tidak ditanggapi secara serius oleh pihak organisasi yang dalam hal ini adalah LPD. Sehingga implementasi *whistleblowing system* belum mampu menekan terjadinya *fraud*.

Temuan studi ini senada dengan temuan studi Pramudyastuti, dkk (2021) yang mengklaim *whistleblowing* berdampak positif pada tindak kecurangan. Diduga ketidak seriusan LPD dalam menanggapi pengaduan yang diberikan oleh masyarakat (*whistleblower*) inilah yang menyebabkan tindak kecurangan mengalami peningkatan, karena dengan melakukan kecurangan mereka tidak akan mendapatkan sanksi yang berat. Implikasi hasil penelitian ini tidak mendukung secara teoritis terhadap perkembangan teori *Fraud Triangle* yang memaparkan bahwa pemicu kecurangan dilakukan ialah karena adanya tekanan, peluang serta rasionalisasi. *Whistleblowing system* dibangun agar memudahkan para *whistleblower* memberikan pengaduan atas terjadinya tindak kecurangan dan berdasarkan hasil penelitian ini, hal tersebut tidaklah sesuai dengan konsepnya, justru *whistleblowing system* meningkatkan tindak kecurangan yang terjadi, hal ini perlu mendapatkan respon dari pihak LPD agar lebih memperhatikan laporan kecurangan yang diberikan dengan sigap meneliti kebenaran laporan tersebut, menetapkan proses sanksi, maupun melindungi atau merahasiakan si pelapor.

Dampak *Good Corporate Governance* Pada Kecurangan *(Fraud)*

Sesuai temuan pengujian *Good Corporate Governance* pada kecurangan *(fraud)* menunjukan bahwa *CGC* berdampak positif serta signifikan pada kecurangan pada LPD di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, artinya hipotesis kedua pada studi ini ditolak (H2 ditolak). Temuan tes hipotesis menujukan semakin baik penerapan GCG pada suatu organisasi maka belum mampu menekan tindak kecurangan *(fraud)*. Hal ini diartikan ditemukannya sejumlah indikator *fraud* di luar model penelitian ini. Penerapan tata kelola oleh

LPD se Kecamatan Banjarangkan belum optimal dilakukan, hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pembekalan konsep GCG terhadap para pengurus LPD, dimana penerapan GCG pada LPD sangat diperlukan guna menunjang kesinambungan tumbuh kembang LPD tersebut.

Temuan studi ini senada dengan studi terdahulu oleh PUTRI, D. A., & Muharrami, R. S. (2023). yang menunjukan hasil bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* berdampak pada *fraud*. Temuan studi ini bertolak belakang atas konsep teoritis *good corporate governance*, yakni dengan adanya pengaplikasian GCG yang baik akan mampu menghindari terjadinya tindak kecurangan. Penerapan GCG pada LPD se Kecamatan Banjarangkan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Klungkung agar memberikan pengarahan, pelatihan serta pendampingan selama dilakukannya praktik penerapan GCG ini. Bagaimanapun juga, LPD se Kecamatan Banjarangkan belumlah optimal dalam menerapan GCG ini, sehingga tindak kecurangan yang terjadi semakin meningkat

Dampak Budaya Etis Organisasi Pada Kecurangan *(Fraud)*

Sesuai temuan pengujian Budaya Etis Organisai pada kecurangan menunjukan bahwa Budaya Etis Organisai berpengaruh negative serta signifikan pada kecurangan pada LPD di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, maknanya hipotesis ketiga pada studi ini diterima (H3 diterima). Budaya etis organisasi dapat dianggap sebagai praktik atau budaya positifnya. Perilaku karyawan akan dibentuk oleh kebiasaan. Karyawan akan mengembangkan karakter dan perilaku yang lebih baik, semakin baik kebiasaan yang dipraktikkan di dalam perusahaan, yang akan memungkinkan mereka untuk menghentikan karyawan lain terlibat dalam penyelewengan atau aktivitas negatif lainnya.

Temuan studi ini memberikan kredibilitas pada temuan studi Putu Eva Indah Pujayani dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2021). Temuan tersebut mengungkapkan bahwa budaya perusahaan berdampak signifikan dan negatif pada kecurangan*).*

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi *whistleblowing* dan *good corporate governance* berdampak positif serta signifikan pada kecurangan. Budaya etis organisasi berdampak negatif serta signifikan pada kecurangan. Implikasi dari temuan kajian tentang kecurangan *(fraud)* adalah penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan masukan dalam penanganan maupun pencegahan tindakan kecurangan *(fraud).* Berkaitan dengan studi ini, rekomendasi yang bisa penulis sampaikan ialah.

Pengurus LPD diharapkan bisa memastikan setiap LPD yang ada di Kecamatan Banjarangkan menyadari bahwa setiap persoalan dengan LPD merupakan tanggung jawab bersama serta harus

terlibat dalam peringatan, pelaporan, dan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi. Agar pengurus dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut, diharapkan juga pengurus LPD di Kecamatan Banjarangkan menyediakan saluran khusus pengaduan, seperti website atau kotak pengaduan, serta jaminan perlindungan dan kerahasiaan pengaduan. data terkait pelapor. Pengurus LPD di berikan pelatihan dan bimbingan terkait integritas dan budaya kerja yang berimplikasi terhadap kecurangan *(fraud).* Oleh karena itu di perlukan adanya pelatihan dan bimbingan terkait pengawasan internal untuk meningkatkan kompetensi pengurus LPD. Seiring dengan semakin seringnya mengikuti acara-acara keagamaan, hal ini akan memperkuat pedoman pengurus LPD untuk menegakkan cita-cita keagamaan dan menahan diri dari tingkah laku yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Diharapkan pada peneliti yang akan melakukan kajian yang sama dimasa mendatang lebih teliti dan menambahkan indikator dan daftar pernyataan yang akan dimanfaatkan guna memperbaiki dan meningkatkan akurasi temuan studi. Harapannya juga dapat melahirkan temuan-temuan kajian yang lebih bermanfaat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A.Garner, Bryan (ed), B*lack's Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York, 2009.

Anugerah, R. (2014). Peranan *Good Corporate Governance Dalam* Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 101-113.

Anak Agung Indah Puspita Dewi, I Putu Nuratama. Pengaruh Komitmen Organisasi, Profesionalisme Dan Retaliasi Terhadap Intensi Dalam Melakukan *Whistleblowing* Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Gianyar Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, Edisi, April 2022.

Cahyo, M. N., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, *4*(2), 249-270.

Dyck, Alexander, Morse, Adair, dan Zingales, Luigi. 2010. Who blows the whistle on corporate fraud?. *The Journal of Finance*. 6 (December), pp. 2213–2253.

Dewi, N. L. H. M. S., Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2022). Pengaruh Moralitas Individu, Religiusitas Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan *(Fraud)* Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(3), 121-132.

Dewi, N. K. A. A., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh moralitas individu, pengendalian intern dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, *29*(1), 64.

Fatmawati, S. (2015). *Pengaruh Whistleblowing System Dan Efektivitas Audit Internal Terhadap*

Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Survey Pada Tiga Bumn Di Kota Bandung) (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas).

Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang Harnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo *Good Governance* Tata Cara Suatu Negara Yang Digunakan Untuk Mengelola Sumber Daya Ekonomi Dan Sosial Yang Berorientasi Pada Pembangunan Masyarakat Demi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (2009).

Muliati, N. K., Yuniasih, N. W., & Putra, P. D. S. (2021). Pengaruh *Whistleblowing* Dan Penerapan Hukum Karma Phala Pada Pencegahan Kecurangan Di Lpd Se-Kota Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi (Juara)*, *11*(2), 243-255.

Nusa bali. 2022. Kasus dugaan korupsi desa Bakas, Pemeriksaan 30 Saksi di kebut. www.nusabali.com/berita/125479/kasus-dugaan-korupsi-lpd-bakas.

Paramitha, N. P. Y. (2020). *Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Pratiwi, N. L. G. D. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2020). Pengendalian internal, budaya organisasi, dan kecenderungan kecurangan akuntansi di LPD Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(11), 2907-2921.

Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 115-135.

Putra, I. P. A. P. E., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *25*(3), 2155-2184.

Rahayu, N. P. N. A., & Putra, I. M. E. L. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kompetensi Sdm, Efektivitas Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi *(Fraud)* Pada Lpd Se-Kecamatan Kediri, Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(3), 92-100.

Sujana, E. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, *Locus Of Control* Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan *(Fraud)* Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Seririt. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *12*(2), 306-317.

Sari, R. N. (2018). Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi *(Fraud)* (Studi Empiris PADA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang). *Jurnal Akuntansi*, *6*(3).

Sugiyono (2017;85) *Non Probability sampling*, *Sampling* Jenuh http://repository.um-surabaya.ac.id/4178/4/BAB_III-1.pdf.

Tribunbali.Com. 2022. LPD BAKAS Digeledah Kejari Klungkung, Buntut Kasus Dugaan Korupsi Rp 4,2 Miliar bali.tribunnews.com/2022/08/11/lpd-bakas-digeledah-kejari-

klungkung-buntut-kasus-dugaan-korupsi-rp-42-miliar.

Utami, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2017). *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, *1*(2), 77-90.

Yuniasih, N. W., Muliati, N. K., & Putra, P. D. S. (2022). Pengaruh *Whistleblowing* Dan Penerapan Hukum Karma Phala Pada Pencegahan Kecurangan Dengan Moderasi Moralitas Di Lpd Se-Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *18*(2), 175- 184.

Yudhistira, R. A. (2016). *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Profesional Auditor, Dan Tingkat Religiusitas Auditor Terhadap Pertimbangan Etis Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya* (Doctoral dissertation, Airlangga University).